

# TAJUK

---

# Pindah Ibu Kota ke Desa Sala

Bukalah lembaran sejarah Indonesia, perpindahan ibu kota negara atau kerajaan itu bukan perkara baru di Nusantara. Tidaklah aneh pula pembesar kerajaan menghendaki istananya dibedol ke tempat baru lantaran pusat pemerintahan yang lama tidak memadai untuk diteruskan.

Ambillah misal, Kota Solo. Sang "Sunga Hindia Belanda" yang juga kampung halaman Presiden Joko Widodo itu dipilih sebagai ibu kota yang baru gara-gara Kerajaan Kartasura dihancurkan musuh tahun 1742. Uniknyanya, pemilihan daerah ibu kota baru tidak mencuat konflik.

Raja Paku Buwono II tidak semena-mena mengusir "kepala suku" Kiai Gede Sala yang sudah mendiami kawasan tersebut turun-menurun. Bisa saja detik itu raja menggerakkan pasukan guna menggempur dan mengusir penduduk setempat.

Pembesar kerajaan justru menyediakan ganti untung terhadap pemilik wilayah itu, bukan sekadar ganti rugi. Pasalnya, Kiai Gede Sala bersama warganya disodori uang kompensasi serta tetap diperbolehkan menempati Desa Sala itu.

Akhirnya, peristiwa *boyong ke dhaton* terjadi tahun 1745 menandai sukses besar. Kala itu, terlibat sekitar 50.000 orang dalam acara kolosal yang dimulai dari bekas Keraton Kartasura yang hancur.

Desa Sala dipilih sebagai ibu kota baru lantaran sudah ramai oleh kegiatan perdagangan lintas bangsa [etnis Eropa, Arab, Tionghoa, dan etnis Bali]. Aktivitas bisnis tersebut diharapkan mampu menyokong perekonomian keraton lewat pemungutan pajak.

Hanya saja saat itu tantangan terbesar yang musti dihadapi adalah bahaya banjir. Sebab, Desa Sala yang cekung ini berdekatan dengan Bengawan Solo yang menjadi urat nadi perniagaan



Heri Priyatmoko

Dosen Sejarah  
Fakultas Sastra  
Universitas Sonata Dharma

lintas daerah. Ibu kota yang baru ini mau tak mau berkawan dengan air.

Terkait kisah peradaban sungai di ibu kota itu, kita dapat menyelidik asal-usul nama atau toponimi Kampung Sangkrah yang hingga kini masih ada jejaknya. "Sangkrah" menurut Wintér dalam kamus *Témbung Kawi Mawi Tégèsipan* (1928) bermakna susah. Sedangkan Poerwadarminta dalam *Basastra Jawa* (1939) menjelaskan terminologi "sangkrah" adalah *rérencekan lsp. sing dtanggo ropoh ut. sing kèli ing banyu* (ranting-ranting yang dipakai untuk mencegat barang yang hanyut di air).

Dari uraian ini diketahui "sangkrah" berkaitan dengan tempat untuk mencegat, membendung, atau berkumpulnya sesuatu yang larut di sungai, misalnya ikan dan sampah. Sangat logis jika Kampung Sangkrah berdekatan dengan Sungai Pepe hingga kini.

Tempo *doeloe*, di lokasi tersebut merupakan tempat "nyangkrah" yang tak jauh dari anak sungai Bengawan Solo. Kita teringat *folklore* yang hidup di era Kerajaan Pajang abad XVI. Putera Tumenggung Mayang ini memacarai puteri Sultan Hadiwijaya tahun 1570-an. Dalam kisahnya, Raden Pabelan dihukum mati karena bermain asmara dengan Raden Ayu Sekar Kedhaton, putri bungsu Sultan Pajang.

Ia mengendap-endap memasuki kedaton menemui gadis pujaannya, namun apes

ia ketahuan penghuni istana. Sultan sangat marah, lalu memanggil prajurit tamtama agar membunuh pencuri itu. Dipimpin Ngabehi Wiro Kerti dan Ngabehi Surotanu, Raden Pabelan dapat ditangkap dan dibunuh sampai tubuhnya hancur tidak berwujud lagi.

Sekujur tubuhnya penuh dengan bekas senjata dan mayatnya dibuang ke Sungai Laweyan. Aliran kali Laweyan (Jenes) memang mengalir sampai Bengawan Semanggi. Mayatnya ini *nyangkrah*, tidak dapat hanyut.

Bekel Kyai Sala yang menjadi penguasa di Desa Sala memergoki jasad tersebut berada di bibir sungai. Mayat itu lalu didorong ke tengah dengan harapan agar terbawa arus air sungai. Esok harinya ternyata jasad Raden Pabelan tidak terbawa arus, masih berada di pinggir sungai. Peristiwa aneh itu terjadi sampai tiga kali.

Bekel Kyai Sala akhirnya memperoleh wisik bahwa jenazah ini minta dikubur di tempat itu. Maka, raja Raden Pabelan diambil dan dikuburkan di sebelah utara Desa Sala dan berdekatan dengan Kedung Lumbu. Lantaran si mayat tidak diketahui namanya maka disebut *Kiai Bathang*, sehingga tempat kuburan itu disebut *Bathangan* (sekarang Kampung Bathangan, yang telah dialihfungsikan menjadi *Pusat Grosir Solo*).

Kuburannya hingga kini dikeramatkan, banyak orang datang berziarah. Makam Raden Pabelan (Kiai Bathang) yang

di masa silam terletak di tepi rawa yang dalam dan lebar, tak jauh dari Kampung Sangkrah.

Karena kemajuan zaman dan perubahan Desa Sala menjadi *kuthanya*, Sangkrah lambat laun disulap menjadi daratan. Semua ini bermula dengan pengurukan Bengawan Semanggi oleh pemerintah kerajaan demi membebaskan keraton dari ancaman banjir era Paku Buwono IV (1788-1820).

Perempan Baturono hingga Sangkrah menjadi daratan, aliran sungai besar difokuskan ke timur, yang kini disebut Bengawan Solo. Sangkrah sedari awal memang sungai besar. Hal itu tersurat dalam Babad Giyanti yang mengisahkan proses pencarian lokasi untuk ibu kota kerajaan.

Berikut ini cuplikannya: "*Sangadipati menyetujui ramalan Tumenggung Hanggawangga, komandan berucap pelan: saudara berdua sekalian para bupati, kalau di desa Sala sangat buruk keadaannya. Tanahnyanya becek dan tidak rata. Selain itu, terlalu dekat dengan bengawan, lebih baik di Kadipala. Akan tetapi, lebih baik kita menaja ke timur yang lebih bagus tempatnya. Patih dan para tumenggung memeriksa dan memastikan kembali keadaan di timur bengawan Sangkrah. Semua rombongan terkesima, melihat dataran yang begitu luas. Sanasucuo, tuan komandan menambahkan, bagus untuk dibangun sebuah kota.*"

Pada halaman lain di *Babad Giyanti*, merekam juga nama Kampung Sangkrah yang masih dijumpai jejaknya hingga kini. Kisah tersebut menggambarkan periode pasca Perjanjian Giyanti tatkala Pangeran Mangkubumi (yang menjadi Hamengku Buwono I) bersama Paku Buwono III memusuhi Pangeran Sambernyawa alias Raden Mas Said.

Pangeran Mangkubumi difasilitasi Paku Buwono III dibangunkan pesanggrahan untuk beristirahat. Berikut ini petilan teksnya: "*Tumenggung Pusponegara dan Tirtawiguna segera menggerakkan kawan-kawannya untuk membangun peristirahatan. Benahilah kampung Dhawutan itu, karena paman Sultan menghendaki disana dibangun pesanggrahan.*"

Dari episode sejarah di atas, dapat ditegaskan bahwa perpindahan ibu kota kerajaan tidak melulu berkisah tentang konflik sosial. Pemilihan ibu kota yang baru buntutnya membawa kemakmuran bagi penduduk adalah dambaan setiap orang. Semoga rencana perpindahan IKN Indonesia menjadi energi positif bagi masyarakat luas.

